



ISSN 2355-8695



JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik

Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015

YUDHI LESTANATA, ULUNG PRIBADI

Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012

MUSTAMA, SURANTO

Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

NUR KHAERAH, DYAH MUTIARIN

Analisis Institusionalisasi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

SIDIK FIRMADI, TITIN PURWANINGSIH

Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Guru Sma Di Kabupaten Kebumen

SRI RAHAYU, ZULI QODIR

Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas

UMMI ZAKIYAH, RAHMAWATI HUSEIN



Vol.3 No.3 October 2016

Sri Rahayu

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: s_rahayu5758@yahoo.com

Zuli Qodir

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: zuli_qodir@yahoo.com

<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0067>

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM
2013 PADA GURU SMA DI KABUPATEN
KEBUMEN****ABSTRACT**

The many problems of education in Indonesia makes its own ambiguity for the executors, where policy-makers think only of quantity without quality. One example is the Curriculum 2013, which are in a hurry to implement it so as to make the policy implementers be confusion as to a delay in textbook for teachers and training is not maximized. This study aims to determine how the curriculum policy implementation in 2013 at a high school teacher in Kebumen with the location of this research is SMA Negeri 1 Kutowinangun, SMA Negeri 1 and 2 Kebumen and education departments and sports Kebumen. The results of this study using the theory of George C. Edward III which indicates that the variable communication on indicators trasmisi and clarity executed well, this is because the education department and sports in collaboration with LPMP activities directly in the form of training, workshops, discussions, and technical guidance to teachers and principals. While the indicators consistent communication can be said is not consistent, which in the implementation of Curriculum 2013 regulations always changing so make the school confusi implement it. Then the variable resources with indicators of human resources (staff) and non-human (infrastructure) can be said not optimal this is because there are many teachers who find difficulty in implementing Curriculum 2013. Variable disposition or attitude of policy implementation can be quite good, where in the implementation of the implementers are always ready and responsible with what is being implemented. In addition the system has to be undertaken systematically and in accordance with the rules of Curriculum 2013. The fourth variable is a bureaucratic structure with indicator Standard Operating Procedure (SOP) this can be evidenced by the guidelines in the implementation of Curriculum 2013, then a good cooperation between agencies physical education and high school party in Kebumen.

Keywords: Implementation, Policy, Education, Curriculum

ABSTRAK

Banyaknya permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia membuat kerancuan tersendiri bagi para pelaksana, dimana para pembuat kebijakan hanya memikirkan kuantitas tanpa adanya kualitas. Salah satu contoh yaitu Kurikulum 2013 yang terlalu terburu buru dalam menerapkannya sehingga membuat para pelaksana kebijakan menjadi kebingungan seperti adanya keterlambatan buku ajar bagi guru dan pelatihan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada guru SMA di Kabupaten Kebumen dengan lokasi penelitian ini yaitu SMA Negeri 1 Kutowinangun, SMA Negeri 1 dan 2 Kebumen serta dinas pendidikan dan olah raga Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menggunakan teori Goerge C Edward III yang menunjukkan bahwa variabel komunikasi pada indikator trasmisi dan kejelasan dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan dinas pendidikan dan olah raga bekerja sama dengan LPMP melakukan kegiatan secara langsung berupa pelatihan, *workshop*, diskusi, serta bimbingan teknis kepada guru dan kepala sekolah. Sedangkan komunikasi pada indikator konsisten dapat dikatakan belum konsisten, dimana dalam pelaksanaannya peraturan tentang Kurikulum 2013 selalu berubah-ubah sehingga membuat pihak sekolah kebingungan dalam menerapkannya. Kemudian pada variabel sumber daya dengan indikator sumber daya manusia (staff) dan non manusia (sarana dan prasarana) dapat dikatakan belum optimal hal ini dikarenakan masih banyak guru yang merasa kesulitan dalam menerapkan Kurikulum 2013.

Variabel disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dikatakan cukup baik, dimana dalam pelaksanaannya para pelaksana selalu siap dan bertanggungjawab dengan apa yang dilaksanakan. Selain itu sistem yang telah ada dijalankan secara sistematis dan sesuai dengan aturan Kurikulum 2013. Variabel yang ke empat yaitu struktur birokrasi dengan indikator *Standar Operating Procedure* (SOP) hal ini dapat dibuktikan dengan adanya juknis dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, kemudian adanya kerjasama yang baik antara dinas pendidikan olah raga dan pihak SMA di Kabupaten Kebumen.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendidikan, Kurikulum,

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sasaran pokok pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan menurut Abu Bakar¹, adalah usaha sadar sistimatis, yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkepribadian. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan menurut Mulyasa², baik buruknya suatu pendidikan bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan kurikulum, dengan begitu gurulah yang paling mengetahui tingkat perkembangan, karakter, dan potensi peserta didik. Seorang guru hendaknya memahami kurikulum dengan baik, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

¹ Abu Bakar. 2012. *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Prinsip dan Problema Pembelajaran Sosiologi*. Volume 11, No 2 Maret 2012

² Mulyasa. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Pemerhati pendidikan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Furqon Hidayatullah melihat ada delapan masalah yang di alami oleh guru dalam menerapkan kebijakan kurikulum 2013. Delapan masalah itu diantaranya yaitu sulitnya mengubah mindset guru, perubahan proses pembelajaran dari teacher centered ke student centered, rendahnya moral spiritual, budaya membaca dan meneliti yang masih rendah. Kemudian, kurangnya penguasaan teknologi informasi, lemahnya penguasaan bidang administrasi, dan kecenderungan guru yang lebih banyak menekankan aspek kognitif. Padahal, semestinya guru harus memberikan porsi yang sama pada aspek afektif dan psikomotorik. Permasalahan kedelapan atau yang terakhir yaitu masih banyak guru yang belum mau menjadi manusia pembelajar. Padahal, seorang guru dituntut untuk terus menambah pengetahuan dan memperluas wawasannya, terlebih setelah diberlakukannya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menuntut guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, dalam hal ini guru harus menjadi manusia pembelajar³.

Berdasarkan peraturan Mendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan 2013, menyatakan bahwa sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan kurikulum 2013. Sedangkan bagi sekolah yang baru menerapkan 1 semester maka dapat kembali menggunakan kurikulum 2006. Adapun data dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen yang masih menyelenggarakan kurikulum 2013 diantaranya yaitu SMA N 1 dan SMA N 2 Kebumen serta SMA N 1

³ <http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/19/307023/ini-delapan-masalah-dalam-implementasi-kurikulum-2013> aksestanggal 28 desember 2014

Kutowinangun. Permasalahan yang mendasar pada guru di kabupaten kebumen dalam menerapkan kebijakan kurikulum 2013 diantaranya yaitu terlambatnya buku pelajaran untuk pegangan guru dan siswa, kemudian belum terlatihnya para guru yang merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum sehingga banyak menemui kesulitan-kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Dari hal tersebut, tugas guru bukan menjadi lebih ringan, bahkan bertambah berat karena guru harus merubah diri dari sekedar berceramah menjadi fasilitator yang mampu mengajak siswa untuk aktif dalam belajar. Selain itu masih banyak guru yang mengeluhkan rumitnya sistem penilaian, dimana dalam penilaian seorang guru diwajibkan untuk mengisi kolom masing-masing anak dengan menggunakan deskriptif. Dalam penilaian ini terdapat 7 lembar format peniliiain yang harus di isi untuk menilai masing-masing siswa. Selain itu dari hasil observasi banyak guru-guru khususnya di Kabupaten Kebumen yang mengeluhkan peraturan yang selalu berubah-berubah⁴.

KERANGKA TEORI

1. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edward III⁵, terdapat empat pendekatan yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi.

a. Komunikasi

⁴ Hasil wawancara dengan narasumber Wahyu Aminoto tanggal 8 Desember 2015

⁵ Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar kebijakan public*. Bandung : Alfabeta

Komunikasi ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan mengetahui sejauh mana implementasi tersebut dapat berhasil. Tiga hal yang penting dalam indikator ini yaitu: transmisi, konsisten, dan kejelasan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya disini berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi untuk melakukan tindakan yang berkompeten dibidangnya. Empat hal yang penting dalam indikator sumberdaya ini seperti: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor. Kecakapan saja tidak cukup tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Para implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan mereka dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dua hal yang penting dalam indikator ini yaitu : pengangkatan birokrat dan insentif.

d. Struktur organisasi

Berkenaan dengan kesesuaian struktur organisasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisai, dan birokrasi merupakan pelaksana kebijakan dan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

2. Pengertian dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka memengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya serta dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat⁶. Pendidikan dalam arti luas mengandung makna bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung dalam satu lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah. Akan tetapi, pendidikan berlangsung dalam setiap ruang kehidupan manusia dan dalam seluruh sektor pembangunan⁷.

Tujuan pendidikan menurut Johan Amos Comenius adalah untuk membuat persiapan yang berguna diakhirat nanti. Sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan diakhirat. Dunia ini adalah buku yang paling lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat⁸. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan di dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa: *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang*

⁶ Oemar Hamalik. 2005. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara

⁷ Rulam Ahmadi. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media

⁸ Umar Tirtarahardja dan La Sulo. 2008. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : RinekaCipta

*beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab*⁹.

3. Pengertian dan Tujuan Kurikulum

Kurikulum menurut Surahmad merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar dikelas¹⁰. Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan¹¹.

Tujuan kurikulum sekolah menurut Esti Ismawati¹² ada dua macam yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan. Tujuan ini meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh lulusan sekolah. Tujuan ini disebut dengan tujuan institusional atau kelembagaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini disebut tujuan kurikuler, adalah penjabaran dari tujuan institusional. Tujuan ini meliputi tujuan instruksional yang diharapkan dimiliki siswa setelah mempelajari tiap bidang studi dan pokok bahasanya dalam proses pengajaran. Dalam skala yang lebih

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

¹⁰ Burhan Nurgiyantoro. 2008. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Yogyakarta : BPEE-Yogyakarta

¹¹ Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta : PT. Rineke Cipta

¹² Esti Ismawati. 2012. *Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar*. Yogyakarta : Penerbit Ombak

luas Oemar Hamalik¹³, kurikulum merupakan suatu alat pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kurikulum selalu menyediakan kesempatan-kesempatan yang luas bagi para peserta didik untuk mengalami berbagai macam proses pendidikan dan pembelajaran guna mencapai target tujuan pendidikan nasional khususnya dan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas pada umumnya.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive*, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan angka¹⁴. Sanapiah Faisal menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk eksploitasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sedangkan teknik *purposive* yaitu pemilihan subjek penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu¹⁵. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi yang menurut Alwasilah C. observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang bertujuan untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya¹⁶. Kemudian wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak,

¹³ Oemar Hamalik. 2005. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara

¹⁴ Lexy Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

¹⁵ Sanapiah Faisal. 2000. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang

¹⁶ Satori. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai orang yang mengajukan atau yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut¹⁷. Serta dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya¹⁸.

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa SMA di Kabupaten Kebumen, salah satunya yaitu SMA Negeri 1 dan 2 Kebumen, serta SMA Negeri 1 Kutowinangun. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan SMA Negeri 1 dan 2 Kebumen serta SMA Negeri 1 Kutowinangun merupakan SMA percontohan yang ditunjuk oleh mendikbud berdasarkan peraturan pemerintah nomor 160 tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Hasil Penelitian Dengan Implementasi Kebijakan Kurikulum Pada Guru SMA di Kabupaten Kebumen

Seperti yang di paparkan pada pemaparan sebelumnya, maka implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 pendekatan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Berikut pemaparan mengenai implementasi kebijakan kurikulum 2013 pada guru SMA di Kabupaten Kebumen

¹⁷ Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : RinekaCipta

¹⁸ Suharsimi Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta

a. Komunikasi

Komunikasi di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga dengan pihak Sekolah Menengah Atas yang bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Waka Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Kebumen Wahyu Aminoto mengatakan bahwa sebagian guru di SMA Negeri 1 Kebumen sudah mengikuti beberapa pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen seperti pelatihan, workshop, diskusi, dan diaolog. Dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan tersebut membuat para tenaga pendidik khususnya guru benar-benar paham mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013¹⁹.

b. Sumberdaya

Terkait dengan sumber daya manusia, SMA Negeri 2 Kebumen mengatakan bahwa guru SMA Negeri 2 Kebumen sudah siap menjalankan kurikulum 2013. Hal yang masih menjadi sedikit kendala bagi guru disini adalah memberikan penilaian kepada siswa-siswa terutama di pencapaian kompetensi siswa, karena sistem penilaian disini tidak hanya angka, tetapi diharuskan membuat deskripsi kemampuan semua siswa dalam menangkap pelajaran satu per satu²⁰. Berikut model penilaian Kurikulum 2013 untuk SMA.

Gambar 1
Model Penilaian Kurikulum 2013

¹⁹ Hasil wawancara dengan narasumber Wahyu Aminoto tanggal 8 Desember 2015

²⁰ Hasil wawancara dengan narasumber NurChayati tanggal 10 Desember 2015

KONVERSI NILAI KETUNTASAN PENCAPAIAN KOMPETENSI
KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM 2006 DI SMA/SMK

No.	Kurikulum 2013		Kurikulum Tahun 2006	
	Rentang Angka	Huruf	Rentang Angka	Huruf
1.	3,85 – 4,00	A	94 - 100	A
2.	3,51 – 3,84	A-	86 - 93	A-
3.	3,18 – 3,50	B+	78 - 85	B+
4.	2,85 – 3,17	B	70 - 77	B
5.	2,51 – 2,84	B-	62 - 69	B-
6.	2,18 – 2,50	C+	54 - 61	C+
7.	1,85 – 2,17	C	47 - 55	C
8.	1,51 – 1,84	C-	38 - 46	C-
9.	1,18 – 1,50	D+	29 - 37	D+
10.	1,00 - 1,17	D	0 - 28	D

Menggunakan Rumus

Konversi nilai dari nilai 1 – 4 ke 0 – 100 menggunakan rumus:

$$\text{Nilai} = \frac{n}{4} \times 100$$

Keterangan:

n = nilai perolehan dalam K-13

Jika nilai perolehan dalam K-06 di bawah 25, nilai tersebut menjadi 25

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen

c. Disposisi

Sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kabupaten Kebumen cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Sudirman selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa pelaksana kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan pihak sekolah selalu mendukung dan siap untuk melaksanakan kebijakan Kurikulum 2013 untuk membangun pendidikan di Kabupaten Kebumen²¹.

d. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan Kurikulum 2013 sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling

²¹ Hasil wawancara dengan narasumber Sudirman tanggal 7 Desember 2015

rendah yaitu daerah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya juknis yang merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013.

Gambar II
Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum
2013 Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah

PERATURAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 5496/C/KR/2014
NOMOR : 7915/D/KP/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
PADA SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, perlu menetapkan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen

Gambar diatas menunjukkan adanya juknis yang digunakan sebagai implementator dalam melaksanakan kurikulum 2013. Sehingga dengan adanya petunjuk teknis tersebut dapat mempermudah agenda kebijakan.

2. Pembahasan Implementasi Kebijakan Kurikulum Pada Guru SMA di Kabupaten Kebumen

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kabupaten Kebumen akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Maka dari itu

kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan juga perlu dikomunikasikan sehingga para pelaksana mengetahui secara tepat mengenai ukuran maupun tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi di dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda-beda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia disini berkaitan dengan keterampilan, kemudian dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup atau belum untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran tersebut. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, sebab tanpa adanya sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kabupaten Kebumen membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan kurikulum tersebut.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan efektif, maka

para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kecenderungan para pelaksana ini merupakan faktor yang ketiga dalam implementasi kebijakan kurikulum. Jika para pelaksana berbuat baik terhadap suatu kebijakan tertentu maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian pula sebaliknya jika tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan menjadi sulit.

d. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme yang sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP) dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 dalam memberikan informasi sudah berjalan baik, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung terhadap target atau objek sasaran yaitu dengan melakukan pelatihan, rapat, *workshop*, diskusi, bimbingan teknis dan dialog mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun secara konsisten kebijakan Kurikulum 2013 dapat dikatakan belum konsisten, hal ini dikarenakan pemberian informasi dan keputusan yang diberikan pemerintah masih berubah-ubah dan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kurikulum di sekolah.

SARAN

Pemerintah harus lebih memperhatikan pendistribusian bahan ajar seperti buku belajar siswa, mengingat pada saat-saat awal pelaksanaan selama lima semester buku pelajaran belum tersedia. Diharapkan untuk tahun 2018 pendistribusian semua buku mata pelajaran sudah siap. Selain itu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi sekolah-sekolah yang belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 harus dapat dijadikan kesempatan oleh sekolah-sekolah tersebut untuk mulai mempersiapkan dan memperbaiki semua sistem baik dari guru, murid maupun fasilitas agar pada tahun 2018 seluruh sekolah di Indonesia benar-benar siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

DAFTAR PUSTAKA

481

- Abu Bakar. 2012. Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Prinsip dan Problema Pembelajaran Sosiologi. Volume 11, No 2 Maret 2012
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. RinekaCipta. Jakarta
- Burhan Nurgiyantoro. 2008. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah. BPEE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Dakir. 2004. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. PT. Rineke Cipta. Jakarta
- Esti Ismawati. 2012. Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- <http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/19/307023/ini-delapan-masalah-dalam-implementasi-kurikulum-2013-aksestanggal-28-desember-2014>
- Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar kebijakan public. Alfabeta. Bandung
- Lexy Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Mulyasa. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Oemar Hamalik. 2005. Kurikulum dan Pembelajaran. Bumi Aksara. Jakarta
- Rulam Ahmadi. 2014. Pengantar Pendidikan. Ar-ruzz Media. Yogyakarta
- Sanapiah Faisal. 2000. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi. YA3 Malang. Malang
- Suharsimi Arikunto. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo. 2008. Pengantar Pendidikan. Rineka Cipta. Jakarta
-